
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2019-2022

Fini Shandi Putri

Politeknik Negeri Padang

Rasyidah Mustika

Politeknik Negeri Padang

Randy Heriyanto

Politeknik Negeri Padang

Alamat: Kampus Limau Manis, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat

Korespondensi penulis: finishandi0@email.com

Abstrak. *This study aims to evaluate the financial performance of provincial governments in the Sumatra region during the period 2019 to 2022. The analysis is based on secondary data obtained from budget realization reports. The assessment uses several financial ratios, including the degree of fiscal decentralization, regional financial independence, the effectiveness of locally generated revenue (PAD), financial efficiency, and the proportion of operating to capital expenditures. The findings reveal that the average decentralization level was below 50%, fiscal independence was moderate at 66%, PAD effectiveness was very high at 102%, and financial efficiency reached 87%. Moreover, operating expenditures made up 77%, far exceeding capital expenditures at 17%. These results indicate that despite the effective management of PAD, provincial governments in Sumatra still need to improve decentralization, spending efficiency, and capital expenditure allocation to enhance fiscal independence and promote sustainable regional development.*

Keywords: *Financial Performance, Degree of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, Effectiveness of Local Revenue (PAD), Financial Efficiency, Expenditure Harmony*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah provinsi yang ada di wilayah Pulau Sumatera selama kurun waktu 2019 hingga 2022. Data yang dianalisis bersumber dari laporan realisasi anggaran yang bersifat sekunder. Metode analisis yang digunakan mencakup penghitungan rasio derajat desentralisasi, tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pengelolaan keuangan, serta perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi berada di bawah 50%, tingkat kemandirian fiskal termasuk dalam kategori sedang dengan angka rata-rata 66%, efektivitas PAD tergolong sangat tinggi dengan rata-rata 102%, dan efisiensi keuangan menunjukkan hasil cukup baik dengan capaian rata-rata sebesar 87%, serta proporsi belanja operasi 77% jauh lebih besar dibanding belanja modal 17%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PAD telah dikelola secara efektif, pemerintah provinsi di Sumatera masih perlu meningkatkan derajat desentralisasi, efisiensi belanja, dan proporsi belanja modal untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan, Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan, Keserasian Belanja*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur, mengurus, dan mengelola keuangannya sendiri. Otonomi daerah memberikan hak bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan

pembiayaan tahunan yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan APBD selanjutnya dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pengelolaan LKPD yang optimal mencerminkan adanya akuntabilitas dan efektivitas dalam kinerja keuangan daerah. Seperti dijelaskan oleh Kismawadi (2023) serta Puspita dan Pangastuti (2022), evaluasi terhadap kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah rasio, antara lain derajat desentralisasi, tingkat kemandirian, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan efisiensi belanja daerah. Sejumlah studi sebelumnya juga mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Wabah yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019 dan menyebar secara global pada awal 2020, turut mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk di Indonesia (Budiman, 2021; Handoyo, 2021). Sebagai respons, pemerintah menetapkan pandemi sebagai bencana nasional dan mulai menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Maret 2020. (Sabiila, 2022).

Dampak pandemi tak hanya dirasakan di sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi. Banyak sektor usaha mengalami kebangkrutan dan pemerintah pusat serta daerah harus merelokasi anggaran untuk merespon dampak krisis tersebut (Budiman, 2021; Kamal & Hidayah, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), realisasi pendapatan dan belanja seluruh provinsi di Indonesia pada 2020 menurun sebesar 7,36% dan 5,82%, sedangkan PAD menurun 7,53%. Kondisi ini terjadi karena melemahnya kemampuan masyarakat dalam berbelanja sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan pembatasan sosial. (Mayningrum & Muhtadi, 2021).

Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami tantangan serupa pada tahun 2020 saat pandemi, pendapatan lebih tinggi dari belanja, sementara pada 2021 belanja melebihi pendapatan. Tahun 2022 kembali menunjukkan peningkatan pendapatan. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah selama masa pandemi. Hambatan seperti keterbatasan SDM keuangan, perbedaan tafsir peraturan BPK, dampak pandemi, serta ketidakefisienan belanja turut memengaruhi pencapaian tersebut.

Pulau Sumatera sebagai pulau terbesar ketiga di Indonesia yang terdiri dari sepuluh provinsi, dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Meski demikian, berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah di wilayah ini masih mengalami kendala dalam mencapai efektivitas dan efisiensi secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh ketimpangan kondisi geografis, perbedaan tingkat ekonomi, serta variasi kebijakan pembangunan antar provinsi. Sayadi (2020) mencatat bahwa daerah-daerah di Pulau Jawa menunjukkan performa keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah di Pulau Sumatera, yang menandakan adanya perbedaan dalam strategi pengelolaan keuangan antar wilayah.

Penelitian yang dilakukan oleh Awani dan Hariani (2021) juga memperkuat temuan tersebut. Analisis dilakukan terhadap rasio kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan, efisiensi anggaran, serta tingkat pertumbuhan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Pulau Sumatera selama periode 2015–2018. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik keuangan antarprovinsi di Sumatera sangat beragam, dan perlu dianalisis lebih mendalam menggunakan cakupan waktu serta indikator yang lebih terkini.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan dan entitas publik lainnya untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan secara transparan dan akuntabel. Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik bertujuan menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi manajemen publik dalam pengambilan keputusan, pengendalian, dan pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan sumber daya publik harus dilakukan dengan cara yang efisien, tepat guna, dan sesuai prinsip ekonomis

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan mengikuti pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPD memberikan gambaran yang andal mengenai posisi keuangan, kinerja fiskal, serta arus kas pemerintah daerah. Salah satu bagian penting dalam LKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang berfungsi untuk membandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pelaksanaannya, serta menjadi alat untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD (Djanegara, 2017; Sheila & Rahmi, 2023)..

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh DPRD, yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Khusaini (2018) menyatakan bahwa APBD berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang mencerminkan arah prioritas pembangunan dan layanan publik, serta menjadi acuan dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Komponen APBD mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta pendapatan sah lainnya. Sementara itu, belanja daerah terdiri dari belanja operasional dan belanja modal, yang keduanya menjadi indikator penting dalam mengukur keselarasan belanja pemerintah daerah (PP No. 12 Tahun 2019)..

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Menurut Nurmalasari & Astuti (2023), kinerja keuangan diukur melalui indikator keuangan seperti efektivitas, efisiensi, dan derajat desentralisasi. Zulkarnain (2020) juga menambahkan bahwa kinerja keuangan dapat menjadi dasar dalam menilai akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) menyatakan bahwa rasio keuangan adalah hasil perbandingan antara dua komponen dalam laporan keuangan yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi tren kinerja keuangan daerah dari waktu ke waktu. Beberapa indikator rasio yang sering digunakan dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio derajat desentralisasi, kemandirian fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, serta keserasian dalam struktur belanja.

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri dan menjalankan fungsi desentralisasi. Tingkat desentralisasi yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber pendapatan yang memadai untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Adapun rumus dari rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi semakin besar, sementara ketergantungan terhadap dana transfer semakin kecil. Selain itu, rasio ini juga mencerminkan bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dapat bersifat instruktif hingga bersifat delegatif. Adapun rumus dari rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target PAD yang telah dirumuskan dalam APBD. Rasio ini memperlihatkan proporsi realisasi pendapatan terhadap anggaran yang direncanakan. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber pendapatan lokal dianggap semakin baik apabila nilai efektivitas PAD semakin tinggi. Adapun rumus dari rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menunjukkan sejauh mana anggaran belanja daerah telah digunakan secara hemat dan tepat sasaran. Rasio ini mengukur perbandingan antara jumlah belanja yang direalisasikan dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Tingkat efisiensi yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan pengeluaran dan mengelola anggaran secara optimal. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rumus Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kesenjangan Belanja

Rasio keserasian belanja menunjukkan proporsi alokasi belanja daerah antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi mencakup pengeluaran rutin yang manfaatnya jangka pendek, seperti belanja pegawai dan barang. Sementara itu, belanja modal digunakan untuk pembiayaan aset yang manfaatnya jangka panjang, seperti infrastruktur. Rasio ini penting untuk mengetahui apakah anggaran daerah lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin atau untuk pembangunan yang berkelanjutan, Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

KERANGKA BERFIKIR

Berdasarkan kajian teori yang telah dijabarkan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibentuk dengan menjadikan “Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Pulau Sumatera” sebagai sumber data utama. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah melalui penerapan sejumlah rasio keuangan yang sesuai



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan serta menganalisis kinerja keuangan pemerintah provinsi di wilayah Pulau Sumatera dalam rentang waktu 2019 hingga 2022. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, dengan sumber berasal dari berbagai laman resmi, termasuk situs Badan Pemeriksa Keuangan. (www.bpk.go.id) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Rasio yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis keuangan daerah, meliputi derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efisiensi keuangan, serta keserasian belanja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Analisis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan kinerja keuangan pemerintah provinsi yang ada di Pulau Sumatera selama periode 2019 hingga 2021. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan lima jenis rasio keuangan, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian. Data yang dianalisis bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi-provinsi di wilayah Sumatera, yang diunduh melalui situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia..

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah. Hasilnya menunjukkan Sumatera Utara memiliki rasio tertinggi 48% dengan kategori "Baik", sedangkan Aceh terendah 19% dengan kategori "Kurang". Secara keseluruhan, rata-rata derajat desentralisasi adalah 38% yang dikategorikan "Sedang".

No	Provinsi	Tahun				Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	17%	18%	18%	21%	19%
2	Sumatera Utara	44%	43%	46%	58%	48%
3	Sumatera Barat	36%	35%	38%	47%	39%
4	Riau	41%	39%	43%	53%	44%
5	Kepulauan Riau	33%	34%	36%	43%	37%
6	Jambi	36%	35%	39%	46%	39%
7	Bengkulu	28%	26%	32%	37%	31%
8	Sumatera Selatan	38%	36%	40%	49%	41%
9	Bangka Belitung	31%	28%	33%	38%	33%
10	Lampung	42%	40%	44%	54%	45%
Rata-Rata Pulau Sumatera		35%	33%	37%	45%	37%

Sumber: Diolah 2024

Rasio derajat desentralisasi di Provinsi Aceh tergolong rendah, namun PAD-nya justru tertinggi di Sumatera. Hal ini terjadi karena meskipun Aceh memiliki otonomi khusus dan pendapatan besar dari sektor sumber daya alam seperti minyak dan gas, pengelolaannya masih berada di bawah pengawasan pusat. Keadaan ini membatasi otonomi fiskal, sehingga rasio desentralisasinya rendah. Sebaliknya, Sumatera Utara memiliki rasio tertinggi karena mampu mengelola sumber daya secara efisien dan menjalankan kebijakan otonomi daerah dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya PAD tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya desentralisasi, karena struktur pengelolaan dan kewenangan fiskal juga memengaruhi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah dilihat dari perbandingan PAD dengan pendapatan transfer dan pinjaman. Aceh termasuk kategori “Rendah Sekali” dengan rata-rata 23%, sedangkan Sumatera Utara, Riau, dan Lampung masuk kategori “Tinggi”. Rata-rata keseluruhan di Sumatera adalah 66% yang termasuk “Sedang”, dengan tren fluktuatif namun meningkat pada tahun 2022.

No	Provinsi	Tahun				Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	21%	22%	22%	27%	23%
2	Sumatera Utara	79%	75%	85%	138%	94%
3	Sumatera Barat	58%	56%	63%	89%	66%
4	Riau	69%	63%	76%	114%	81%
5	Kepulauan Riau	50%	52%	57%	75%	58%
6	Jambi	56%	54%	64%	86%	65%
7	Bengkulu	39%	35%	48%	58%	45%
8	Sumatera Selatan	61%	57%	68%	97%	71%
9	Bangka Belitung	47%	43%	51%	61%	50%
10	Lampung	113%	113%	77%	118%	105%
Rata-Rata Pulau Sumatera		59%	57%	61%	86%	66%

Sumber: Diolah 2024

Provinsi Aceh memiliki rasio kemandirian keuangan yang rendah karena sangat bergantung pada transfer dari pusat. Status otonomi khusus menjadikan transfer dana ke Aceh besar, namun hal ini juga membatasi fleksibilitas fiskal. Selain itu, kebutuhan besar untuk pemulihan pascabencana turut mempengaruhi struktur penerimaan. Berbeda dengan Aceh, Provinsi Lampung menunjukkan kemandirian tinggi karena mampu menghasilkan PAD yang besar dari sektor pertanian dan komoditas ekspor. Ini menunjukkan bahwa daerah dengan sektor unggulan yang dikelola maksimal dapat membiayai pemerintahan memiliki kemandirian serta tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Aceh dan Jambi tergolong “Sangat Efektif” dengan rasio di atas 109%, disusul Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Rata-rata efektivitas di Pulau Sumatera adalah 102%, yang berarti “Sangat Efektif”.

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DI PULAU SUMATERA TAHUN 2019-2022**

No	Provinsi	Tahun				Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	104%	118%	104%	113%	110%
2	Sumatera Utara	92%	102%	102%	100%	99%
3	Sumatera Barat	98%	104%	103%	101%	102%
4	Riau	99%	100%	101%	97%	99%
5	Kepulauan Riau	104%	103%	96%	116%	105%
6	Jambi	105%	113%	115%	112%	111%
7	Bengkulu	73%	96%	111%	106%	96%
8	Sumatera Selatan	102%	93%	81%	92%	92%
9	Bangka Belitung	93%	91%	117%	116%	104%
10	Lampung	101%	96%	97%	97%	98%
Rata-Rata Pulau Sumatera		97%	102%	103%	105%	102%

Sumber: Diolah 2024

Selama 2019–2022, efektivitas PAD di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung cukup tinggi. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran dan program yang tepat sasaran serta berdampak langsung pada indikator pembangunan. Sementara itu, Aceh, Sumbar, Kepri, Jambi, dan Bangka Belitung mencatat efektivitas sangat tinggi karena berhasil memaksimalkan potensi PAD melalui kebijakan fiskal yang akurat dan peningkatan kapasitas pemungutan pajak. Tingginya efektivitas ini memberi dampak positif terhadap pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan pembangunan daerah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio ini mengukur penghematan anggaran. Aceh tergolong “Efisien”, sedangkan Bengkulu termasuk “Kurang Efisien”. Rata-rata rasio efisiensi pada tahun 2019–2021 tergolong “Cukup Efisien”, namun tahun 2022 meningkat menjadi 90%, masuk dalam kategori “Kurang Efisien”.

No	Provinsi	Tahun				Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	79%	69%	78%	93%	80%
2	Sumatera Utara	78%	85%	94%	99%	89%
3	Sumatera Barat	88%	89%	96%	103%	94%
4	Riau	79%	76%	86%	79%	80%
5	Kepulauan Riau	80%	94%	97%	98%	92%
6	Jambi	86%	84%	76%	82%	82%
7	Bengkulu	106%	97%	94%	102%	100%
8	Sumatera Selatan	69%	74%	105%	96%	86%
9	Bangka Belitung	84%	92%	78%	68%	80%
10	Lampung	77%	82%	80%	79%	80%
Rata-Rata Pulau Sumatera		83%	84%	89%	90%	86%

Sumber: Diolah 2024

Provinsi Aceh tergolong efisien karena dapat mengelola pengeluaran dan pendapatan secara seimbang, dengan alokasi anggaran yang fokus pada sektor prioritas dan kesiapan cadangan keuangan. Hal ini mencerminkan tata kelola fiskal yang baik. Sebaliknya, Provinsi Bengkulu dinilai kurang efisien karena masih mengandalkan bantuan pusat dan belum mampu menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran. Hal ini menyebabkan pelayanan publik dan pembangunan belum optimal, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Rasio Kesenjangan Belanja

Belanja operasi mendominasi total belanja dengan rata-rata 76,2%, menunjukkan kesenjangan yang cukup baik. Sementara itu, belanja modal hanya sekitar 17,1%, menunjukkan alokasi yang masih rendah terhadap pembangunan jangka panjang.

No	Provinsi	Tahun				Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	74,6%	80,7%	79,7%	77,4%	78,1%
2	Sumatera Utara	87,5%	75,8%	71,9%	60,6%	74,0%
3	Sumatera Barat	81,1%	79,0%	73,1%	65,9%	74,8%
4	Riau	83,1%	84,4%	74,9%	78,5%	80,2%
5	Kepulauan Riau	79,9%	82,2%	74,8%	68,2%	76,3%
6	Jambi	78,0%	78,5%	86,0%	76,3%	79,7%
7	Bengkulu	69,9%	79,3%	73,6%	69,5%	73,1%
8	Sumatera Selatan	74,9%	73,0%	53,3%	46,6%	62,0%
9	Bangka Belitung	80,5%	79,0%	79,5%	81,5%	80,1%
10	Lampung	81,8%	84,8%	85,8%	82,3%	83,7%
Rata-Rata Pulau Sumatera		79,1%	79,7%	75,3%	70,7%	76,2%

Sumber: Diolah 2024

No	Provinsi	Tahun				Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	25,4%	17,7%	20,3%	22,5%	21,49%
2	Sumatera Utara	12,3%	13,7%	8,6%	14,2%	12,20%
3	Sumatera Barat	18,8%	13,1%	10,3%	14,9%	14,28%
4	Riau	16,9%	14,0%	12,6%	21,5%	16,27%
5	Kepulauan Riau	20,1%	17,7%	9,1%	14,4%	15,33%
6	Jambi	22,0%	17,4%	12,6%	23,6%	18,87%
7	Bengkulu	23,8%	15,5%	11,3%	13,8%	16,07%
8	Sumatera Selatan	25,0%	24,1%	18,3%	15,9%	20,82%
9	Bangka Belitung	19,5%	19,8%	20,3%	18,2%	19,44%
10	Lampung	18,2%	13,1%	14,2%	18,9%	16,08%
Rata-Rata Pulau Sumatera		20,2%	16,6%	13,7%	17,8%	17,1%

Sumber: Diolah 2024

Sebagian besar pemerintah provinsi di Sumatera masih memprioritaskan belanja operasional, seperti gaji dan administrasi, karena dianggap kebutuhan dasar dan rutin. Rendahnya PAD juga mendorong pemda fokus pada pemenuhan kebutuhan harian dibanding investasi jangka panjang. Akibatnya, belanja modal menjadi rendah dan berisiko menghambat pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pandemi COVID-19 juga turut mempengaruhi prioritas belanja, sehingga daerah lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran. Kedepan belanja modal perlu ditingkatkan agar pemerintah daerah lebih mampu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, kinerja keuangan pemerintah provinsi di wilayah Sumatera selama periode 2019 hingga 2022 menunjukkan variasi antar provinsi. Rasio derajat desentralisasi berada pada tingkat sedang dengan rata-rata di bawah 50%, yang menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal ke daerah masih belum maksimal. Sementara itu, rasio kemandirian keuangan juga tergolong sedang dengan karakteristik hubungan yang bersifat partisipatif, tercermin dari rata-rata nilai antara 59,24% hingga 86,33%. Di sisi lain, efektivitas PAD berada dalam kategori sangat efektif, dengan nilai rata-rata sebesar 101,6%, yang menandakan bahwa daerah mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Dari sisi efisiensi, rata-rata 86,31% mengindikasikan kinerja cukup efisien, meskipun beberapa provinsi masih menunjukkan efisiensi rendah. Rasio keserasian belanja belum seimbang, dengan dominasi belanja operasi (70%–80%) dibanding belanja modal (16%–20%). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi, desentralisasi fiskal, serta alokasi belanja modal guna mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan secara lebih mendalam dengan menambahkan berbagai indikator atau rasio analisis lainnya, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih menyeluruh dan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2021-2022*.
- Budiman, I. (2021). Converting Conventional Banks to Sharia Banks in Aceh: An Effort to Maintain a Stable Economy in the COVID-19 Outbreak. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 24. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337>
- Costari, N., & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77.
- Efriyanto, R., Herawati, H., & Sari, N. Y. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 4(2), 121–133.
- Handoyo. (2021, June). *Kasus Pertama COVID-19 Mungkin Melanda China Sejak Oktober 2019*. Kontan.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Grasindo.
- Kamal, S., & Hidayah, N. (2022). Expectations of Paying Zakat on Profession during the Pandemic. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 4795–4807.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Kismawadi, E. R. (2023). Improving Islamic Bank Performance Through Agency Cost and Dual Board Governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

- <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0035>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (Issue August). Andi.
- Mayningrum, S., & Muhtadi, K. (2021). i-SMARTS: Digitalization of Agrotechnopreneurship-Based MSME Development to Support Acceleration of East Java Economic Recovery in The Middle of The Covid-19 Pandemic. *East Java Economic Journal*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v5i1.56>
- Nurmalasari, O., & Astuti, T. D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun 2020-2022. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 6(3), 302–309.
- Palupi, D., Dassaad, D., Riyanti, R., & Wahyudi, B. W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1819–1832.
- Purba, T. R., Simatupang, T. F. U., & Sitohang, A. P. N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2016-2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 684–697.
- Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19. *Among Makarti*, 15(1). <https://doi.org/10.52353/ama.v15i1.246>
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2296–2313.
- Putri, R. S., Fermansyah, D., Eliza, A., & Suharto, S. (2021). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 60–72.
- Sabiila, S. I. (2022). *Kasus Corona Pertama di Indonesia: Ini Kilas Balik Usai 2 Tahun Berlalu*. DetikNews.
- Sayadi, M. H. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 16(2), 96–104. <https://doi.org/10.21067/jem.v16i2.4958>
- Sheila, S. D. R., & Rahmi, S. D. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 292–300.
- Silalahi, B. G. P., Nanda, S. T., & Kamilah, F. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 4(3), 241–254.
- Sinaga, J., & Hernando, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 1–12.
- Sodikin, H. Z., & Nopiana, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh. *YUME: Journal of Management*, 4(3).
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48–61.
- Wellyan, V. R., Novaria, E., & Lisdiana, L. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(3), 216–232. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2456>
- Zukhri, N. (2020). Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala Repositori IMWI*, 3(1), 61–74.